

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN KONTRAKTOR DALAM EVALUASI PENAWARAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daniel Rashoky Simalango dan Harijanto Setiawan

Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jln. Babarsari 43 Yogyakarta
e-mail: rashoky_91@yahoo.com, haris@mail.uajy.ac.id

Abstract: Various factors were found as the cause of the contractor's failure in bid evaluation in the tender of government projects. This study aims to explore the factors that cause contractors to fail in electronic project procurement in the Special Region of Yogyakarta. The study was conducted based on a qualitative approach with documents as data sources. The secondary data was obtained from the Electronic Procurement Service Website (LPSE) of the Special Region of Yogyakarta in 2017. Qualitative data analysis was carried out using NVivo software in order to classify data that has similar meanings, which can be considered as the factors that cause failure of contractors in government projects tender. The results show that technical factors are the most common cause of failure, both in building projects, roads and bridges, and waterworks. Specifically, the technical factors that are the cause of the failure are different for each type of project. Technical factors related to core personnel are the cause of failure in building and waterworks projects, while the construction method is the cause of failure in road and bridge projects.

Keywords: contractors, tender, government project, qualitative study

PENDAHULUAN

Industri konstruksi merupakan industri yang mempunyai peran penting dalam mengendalikan perkembangan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Hal ini dikarenakan industri konstruksi mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan dan pemeliharaan aset fisik bangsa yang berguna untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Peran penting industri konstruksi ini terjadi pada semua bangsa, oleh karenanya industri ini menjadi industri besar dan penting di banyak negara. Peran industri konstruksi ini menjadi semakin penting di negara yang sedang berkembang yang pembangunannya masih terus berlangsung (Winch, 2010).

Kondisi semacam ini juga terjadi di Indonesia yang masih terus membangun terlebih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dimana salah satu fokus Pemerintah Indonesia adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang merupakan aset fisik bangsa Indonesia ini perlu diperhatikan agar proses pengadaannya berlangsung dengan baik dan benar. Tuntutan ini semakin penting pada proyek-proyek pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) mengingat dananya berasal dari rakyat. Dalam situasi seperti ini dituntut proses pengadaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu perlu juga diperhatikan agar proses pengadaannya berlangsung dengan persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No 54/2010) yang merupakan perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres No 4/2015). Dengan demikian diharapkan hasil pelelangan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun keuangan. Selain itu diharapkan akan membawa manfaat yang baik bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Hingga saat ini prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengacu pada kedua peraturan yang telah disebutkan di atas. Sesuai peraturan yang belaku, proses pemilihan pemenang lelang pengadaan jasa konstruksi dilakukan oleh kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan cara meneliti dan menilai dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta

lelang. Kesalahan dalam penilaian terhadap dokumen penawaran dan kualifikasi perusahaan akan berakibat kekeliruan dalam menetapkan pemenang lelang yang akan berdampak pada buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan. Di sisi lain, agar kontraktor dapat sukses menjalani proses pelelangan maka kontraktor harus dapat memenuhi semua tuntutan yang telah disyaratkan. Sesuai Peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas, secara umum tahapan evaluasi penawaran terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap evaluasi administrasi, tahap evaluasi teknis, tahap evaluasi harga dan tahap pembuktian kualifikasi. Pada setiap tahap evaluasi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa atau kontraktor agar dapat lolos sebagai peserta lelang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang. Pada kenyataannya masih dijumpai kenyataan banyaknya peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tentunya kejadian ini akan merugikan kontraktor karena tidak dapat mengikuti persaingan untuk memenangkan proyek yang dilelangkan.

Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan di atas, kiranya penting untuk dilakukan penelitian pada faktor-faktor yang menjadi penyebab gagalnya kontraktor saat mengikuti pelelangan proyek pemerintah. Selain itu perlu diketahui pula tingkat kemungkinan terjadinya masing-masing faktor tersebut. Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab kegagalan beserta tingkat kemungkinan terjadinya, kontraktor akan menjadi lebih waspada dan menyiapkan segala persyaratan dengan lebih baik. Dengan demikian kontraktor diharapkan dapat meminimalkan kemungkinannya gagal dalam pelelangan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab gugurnya kontraktor beserta tingkat kemungkinan terjadinya pada pelelangan proyek pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dijalankan dengan pendekatan penelitian kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode tahun 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Kegagalan Kontraktor

Penelitian terkait evaluasi kontraktor dalam pelelangan pada proyek pemerintah telah banyak dilakukan dari waktu ke waktu dengan mengangkat kasus pada beberapa daerah di Indonesia seperti Kabupaten Natuna (Syahrudin dan Rafie, 2016), Daerah Istimewa Yogyakarta (Arifin dan Juwanti, 2013), Bali (Karyasa dkk, 2014), Nusa Tenggara Timur (Pio dkk., 2015), Kabupaten Pelalawan (Prihatini dkk., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena akan bermanfaat untuk para kontraktor di masing-masing daerah.

Penelitian-penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penelitian yang berbeda dan memberi hasil yang berbeda-beda pula. Tentunya hasil ini dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang ada di masing-masing daerah. Secara garis besar, penelitian-penelitian ini dapat dijelaskan seperti di bawah ini.

Penelitian yang ditinjau dimulai dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Diawali (Syahrudin dan Rafie, 2016) yang melakukan penelitian untuk mengevaluasi penawaran pengadaan pekerjaan konstruksi yang secara khusus berfokus pada pekerjaan yang dilelangkan melalui pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi, metode satu sampul dan sistem gugur. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang mengevaluasi langsung dokumen lelang dari 3 kontraktor yang mengikuti pelelangan. Hasil evaluasi menyatakan bahwa ketiga kontraktor ini tidak memenuhi persyaratan sehingga pelelangan dinyatakan gagal. Di tahun yang sama, Arifin dan Juwanti (2013) melakukan penelitian tentang harga penawaran dan faktor penentu pemenang lelang. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada kontraktor non-kecil dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang paling menentukan pemenang lelang adalah evaluasi administrasi kemudian evaluasi teknis dan yang terakhir adalah evaluasi harga. Selanjutnya diikuti Karyasa dkk (2014) meneliti penyebab kegagalan peserta lelang pada pengadaan secara elektronik. Penelitian ini dijalankan secara kuantitatif dengan menggunakan metode

analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidak siapan kontraktor untuk menjalani pelelangan secara elektronik sebagai faktor penyebab yang utama. Sementara Pio dkk. (2015) meneliti faktor yang mempengaruhi pemilihan pemenang lelang jasa konstruksi khususnya pada proyek pemerintah. Penelitian dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan faktor paling dominan mempengaruhi pemilihan pemenang lelang dan kelompok faktor yang terdiri 15 faktor antara lain kelengkapan dan kesesuaian syarat-syarat yang diminta dalam dokumen lelang, pengalaman kontraktor; bukti dukungan bank, kelengkapan dan ketersediaan peralatan konstruksi, tingkat pendidikan dan pengalaman personil proyek lapangan, dsb. Yang terakhir ditinjau adalah penelitian Prihatini dkk. (2017) tentang kegagalan kontraktor dalam pelelangan sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus pada Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kegagalan paling dominan bervariasi persentasenya dari tahun ke tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Berdasarkan kenyataan bahwa penelitian terkait penyebab kegagalan pada pelelangan proyek pemerintah masih banyak dilakukan pada beberapa tahun terakhir di beberapa daerah, dapat disimpulkan bahwa topik ini masih merupakan topik yang relevan untuk dilakukan. Hasil penelitian-penelitian ini bermanfaat bagi kontraktor untuk melakukan introspeksi ke dalam tentang kekurangan-kekurangannya dalam proses pelelangan. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian tersebut mendapati bahwa pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui penyebaran dan pengisian kuesioner. Dengan demikian penelitian ini berniat melengkapi penelitian pada topik ini dengan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kualitatif.

Peraturan Pemerintah Pengadaan Barang dan Jasa

Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 [2]

yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [3]. Selanjutnya kedua peraturan tersebut banyak diacu oleh penelitian-penelitian tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Indonesia dari berbagai aspek.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut dapat dirumuskan kriteria pemilihan penyedia jasa konstruksi/ kontraktor untuk pengadaan proyek pemerintah. Kriteria untuk pemilihan penyedia jasa meliputi empat aspek, yaitu kualifikasi, administrasi, teknis dan harga. Selanjutnya keempat kriteria tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub-kriteria seperti diuraikan di bawah ini.

1. Evaluasi kualifikasi yang mencakup aspek legal dari kontraktor peserta lelang, seperti misalnya: akta pendirian perusahaan, surat izin usaha jasa konstruksi (siujk), tanda daftar perusahaan (tdp), surat izin tempat usaha/ izin gangguan (situ/ ho), nomor pokok wajib pajak (npwp), sertifikat bpjs ketenagakerjaan, sertifikat manajemen mutu (iso), sertifikat manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (k3), dan sebagainya.
2. Evaluasi administrasi yang mencakup persyaratan administrasi untuk mengikuti pelelangan, seperti misalnya: surat penawaran, jaminan penawaran, surat perjanjian kemitraan, rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), dokumen penawaran teknis, dan sebagainya
3. Evaluasi teknis yang mencakup aspek teknis untuk pelaksanaan proyek seperti misalnya: metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, peralatan utama minimal, personil inti, spesifikasi teknis memenuhi persyaratan
4. Evaluasi harga yang meliputi berbagai kriteria terkait dengan harga penawaran yang diajukan, antara lain: klarifikasi atau evaluasi kewajaran harga yang meliputi kewajaran harga satuan dan kuantitas, ketentuan-ketentuan jika terjadi kondisi khusus seperti total harga penawaran terkoreksi melebihi harga perkiraan sendiri (HPS), harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, mata

pembayaran dengan harga satuan nol, dan sebagainya.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat dilaksanakan berdasarkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau gabungan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Saunders dkk. (2012) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data dan pengolahannya yang berfokus pada data numerik, sementara penelitian kualitatif lebih mengarah pada data yang bukan numerik tetapi data deskriptif yang dapat berupa informasi dalam kata-kata, gambar maupun video. Penelitian ini dijalan dengan pendekatan kualitatif dimana data yang digunakan berupa data bukan numerik yang berupa informasi dalam bentuk kata-kata.

Jenis dan Sumber Data

Pendekatan kualitatif dijalankan dalam penelitian ini dengan menggunakan data berupa infor-

masi dalam bentuk kata-kata yang bersumber pada dokumen. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan dokumen sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2015), data yang diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang memuat catatan mengenai peristiwa yang telah berlalu yang menunjang penelitian yang dilakuk-

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode tahun 2017. Unit Layanan Pengadaan (ULP) menyatakan dalam situs tersebut alasan-alasan gagalnya kontraktor dalam pelelangan kategori pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, situs ini dapat dijadikan sumber data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu mengidentifikasi alasan-alasan kegagalan kontraktor dalam pelelangan proyek konstruksi yang didanai pemerintah. Untuk memperjelas sumber data pada penelitian ini, contoh tampilan pada situs LPSE dapat dilihat pada Gambar 1.

Pemenang Lelang						
Nama Lelang	Pembangunan jaringan listrik pedesaan rayon wates					
Kategori	Pelayanan Konstruksi					
Instansi	Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta					
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN LURUH, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL					
Pagu	Rp 3.434.185.000,00					
HPS	Rp 3.433.587.614,00					
Nama Pemenang	PT. DECO CIPTA PRATAMA					
Alamat	Jl. Imogiri Barat Km.5 No : 30 Wojo Baru,Bangunharjo,Sewon, Bantul - Bantul (Kab.) - Di Yogyakarta					
NPKP	02.478.271.6-543.000					
Harga Penawaran	Rp 3.228.825.960,00					
Hasil Pembukaan						
No	Nama Peserta	Administrasi Teknis	Harga Penawaran	Harga Terkecil	Pemenang	Alasan
1	CY WAHYU BINTAN - 03.208.802.6-543.000					
2	Cahaya Abadi Segi - 06.170.026.0-543.000					
3	NIKA SUKMA - 31.504.642.8-516.000					
4	PT. SINAR TERANG GENDILANG - 74.477.185.0-500.000					
5	PT. TIRTA NUGROHO JATI - 02.879.817.7-568.000					
6	PT. Tirtha Bhussana Aeri - 01.600.060.6-504.000					
7	PT. HUNTIHOJO JAYA TEKNIKA - 80.860.691.7-521.000					
8	Materan Bragan Engineering - 75.071.065.9-542.000					
9	PT. LANGGENG REKSI - 03.000.686.0-506.000					
10	PT. Sinar Perdana - 21.054.882.2-542.000	✓				Personil atas nama Sasrialman, ST, Sugiyono, ST, Puji Permomo, AHM, Chri Ariantio, Suprihato & Suhardiman Sudah dipergunakan untuk paket pekerjaan yang lain dan diyakini dengan personil yang sama dalam paruh waktu yang sama tidak akan bisa kerja secara optimal, sehingga tidak akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan persyaratan.
11	PT. DECO CIPTA PRATAMA - 02.478.271.6-543.000	✓	Rp 3.228.825.960,00	Rp 3.228.825.960,00	★	
12	PT. HARCO HARUNGAL PERKASA - 01.257.413.8-541.000	✓				Personil atas nama Sakti Dewarto, ST adalah Ahli Sistem Manajemen Hutan tidak memenuhi minimum persyaratan profesi/keahlian/sertifikat, yang disampaikan SKA Teknis Tenaga Listrik dalam persyaratan Dokumen SKA Ahli Manajemen Hutan; 2) Personil atas nama Hidayat selaku Pelaksana Tenaga teknis tidak memenuhi minimum persyaratan pendidikan yang disampaikan jajah 5791, dalam persyaratan Dokumen jajah 03 Teknik Listrik/mesin; 3) Personilnya tidak menunjukkan referensi/pengalaman kerja dari pengguna jasa (PPN/PANPA); 4) Tidak menyampaikan surat dukungan material JTS & JTH dari pabrik dan lampiran SNI ISO 9001:2015 sehingga penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis.

Gambar 1. Tampilan Informasi Pemenang Lelang (Sumber: <http://lpse.jogjaprovo.go.id>)

Proyek konstruksi dalam penelitian ini dibatasi pada proyek gedung, jalan dan jembatan serta bangunan air dengan nilai di atas 2,5milyard rupiah. Adapun kategori pelelangannya adalah pelelangan umum pascakualifikasi, metode satu sampul dan sistem gugur. Dengan kriteria tersebut, penelitian ini mengevaluasi data yang berasal dari 36 proyek yang terdiri dari 19 proyek gedung, 14 proyek jalan dan jembatan, dan 3 proyek bangunan air.

Analisis Data Kualitatif

Menurut Cresswell (2003), analisis data kualitatif mengikuti beberapa langkah dasar seperti dijelaskan berikut ini.

1. Data disiapkan dan diatur sedemikian agar siap untuk dianalisis. Pengaturan

- data dapat dilakukan dapat dilakukan melalui beberapa cara sesuai jenis data dan cara pengolahannya.
2. Berikutnya data yang telah diatur sesuai kebutuhan, dibaca dan diobservasi agar peneliti mengenal data yang akan diolah dan memiliki gambaran makna yang terkandung dalam data.
 3. Data yang telah dipahami secara garis besar dapat mulai dianalisis dengan proses koding, yaitu proses dimana data dipecah menjadi komponen-komponen yang dapat dinamai sehingga tema-tema yang terkandung dalam data dapat diidentifikasi. Lebih lanjut, peneliti dapat mengeksplorasi analisis tambahan seperti misalnya mengembangkan model teoritis
 4. Diskusi lebih lanjut atas tema-tema yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya perlu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam atas temuan penelitian
 5. Tahap akhir dari penelitian kualitatif adalah menginterpretasikan temuan penelitian yang dapat didasarkan pada pendapat pribadi peneliti, perbandingan dengan informasi dari literature, teori yang telah ada atau kombinasi dari ketiganya.

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap seperti diuraikan di atas yang disesuaikan dengan data yang tersedia dan tujuan dari penelitian ini. Analisis data kualitatif dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo agar prosesnya menjadi lebih mudah dan efisien. NVivo merupakan perangkat lunak untuk menjalankan analisis data kualitatif dengan mengklasifikasikan, mengurutkan dan mengatur data atau informasi yang telah terkumpul. Selain itu analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan NVivo yaitu memeriksa hubungan antar data dan membuat permodelan data.

Data yang telah tersedia pada website LPSE diunduh dan ditranskripsikan agar memudahkan pengolahannya. Transkrip data dibaca berulang oleh peneliti sehingga peneliti mempunyai gambaran tentang isi data agar proses koding mudah dilaksanakan. Selanjutnya semua data diimpor ke dalam perangkat lunak NVivo 10 dan proses koding dilakukan melalui beberapa tahap.

Analisis lanjutan dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam NVivo, yaitu menampilkan project map yang merupakan representasi grafis dari koding pada tiap nodal. Project map dalam NVivo dapat divisualisasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya diagram hirarkis. Pada diagram hirarkis ditampilkan seperangkat empat persegi panjang dalam berbagai ukuran luas. Ukuran luas menunjukkan jumlah koding pada satu nodal. Dengan demikian ukuran luas menunjukkan perbandingan antara banyaknya koding di satu nodal dengan nodal lain. Angka absolut pada tiap nodal bukanlah hal penting dalam analisis ini. Diagram hirarkis pada penelitian ini digunakan untuk melihat dominasi penyebab kegagalan kontraktor dalam lelang proyek pemerintah dari yang paling dominan hingga paling tidak dominan.

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data penyebab kegagalan kontraktor dalam pelelangan proyek pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan seperangkat penyebab yang dikelompokkan ke dalam 4 kriteria seperti diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2015. Data yang diolah merupakan data tahun 2017 yang telah dipublikasikan di website LPSE.

Pada tahap awal telah diidentifikasi banyak nodal yang mewakili faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam proses pelelangan. Nodal ini diperiksa lebih lanjut sehingga beberapa nodal digabung menjadi satu nodal atau satu nodal dipecah menjadi beberapa nodal. Proses ini terus dilakukan hingga akhirnya diidentifikasi seperangkat faktor penyebab kegagalan kontraktor dalam pelelangan. Faktor-faktor ini dikelompokkan dalam empat kriteria seperti ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yaitu: (1) kualifikasi, (2) administrasi, (3) teknis dan (4) harga. Analisis data ini dilakukan terpisah untuk tiap jenis proyek, yaitu gedung, jalan dan jembatan, serta bangunan air. Hasil pengolahan data ditampilkan secara terpisah pada Tabel 1 untuk faktor-faktor penyebab kegagalan pada pelelangan 18 proyek gedung, Tabel 2 untuk pelelangan 14 proyek jalan dan jembatan,

sedangkan Tabel 3 untuk pelelangan 3 proyek bangunan air.

Tabel 1. Penyebab kegagalan pada pelelangan proyek gedung

1. Faktor Kualifikasi
a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) belum diregistrasi
b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dokumen penawaran
c. Tidak dapat menunjukkan NPWP asli
d. Tidak melampirkan surat kesanggupan BPJS
e. Akta pendirian perusahaan tidak dilampiri pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
f. Sisa Kemampuan Paket (SKP) dan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) tidak dilampirkan
g. Tidak memiliki pengalaman sejenis dalam kurun 4 tahun terakhir.
h. Tidak memenuhi persyaratan klasifikasi / sub-klasifikasi
i. Tidak melampirkan sertifikat ISO, OHSAS, dan SMK3
j. Tidak melampirkan formulir Kemampuan Dasar (KD)
2. Faktor administrasi
a. Tidak hadir pada saat verifikasi.
b. Tidak melampirkan surat perjanjian kerja sama.
c. Tidak memberi Rincian Harga Penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga)
d. Dokumen penawaran teknis
i. Surat Dukungan Material tidak disampaikan dan tidak sesuai dokumen penawaran,
ii. Surat Dukungan Alat tidak disampaikan dan tidak sesuai dokumen penawaran,
iii. Data Persyaratan Teknis tidak disampaikan.
e. Tidak menyampaikan analisis teknis salah satu pekerjaan.
3. Faktor teknis
a. Metode pelaksanaan yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dokumen penawaran, dan tidak melampirkan metode pelaksanaan.
b. <i>Network planning</i> tidak dilampirkan
c. <i>Time schedule</i> tidak sesuai metode kerja dan jadwal pelaksanaan
d. Bukti kepemilikan alat tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan
e. Personil Inti
i. Surat kesanggupan personil tidak dilampirkan dan tidak sesuai,
ii. Surat referensi pengalaman kerja tidak disampaikan,
iii. Ketentuan personil tidak sesuai persyaratan tingkat pendidikan
iv. Jumlah minimal personil yang disampaikan kurang,
v. Ijazah asli tidak dapat ditunjukkan
vi. Sertifikat kompetensi tidak dilampirkan dan tidak memenuhi syarat,
vii. NPWP personil tidak dilampirkan,
viii. Sertifikat K3 personil sudah habis masa berlakunya,
ix. Struktur organisasi tidak dilampirkan dan personil tidak sesuai
x. KTP personil tidak dilampirkan dan masa berlakunya sudah habis,
xi. Personil yang ditawarkan sudah digunakan pada paket pekerjaan lain.
f. Spesifikasi teknis tidak sesuai ketentuan dokumen lelang.
g. Tidak melampirkan data pekerjaan yang disubkontrakkan.
4. Faktor harga
Analisis harga satuan pekerjaan tidak menunjukkan satuan kebutuhan tenaga, bahan dan alat

Berdasarkan hasil analisis data yang ditampilkan pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 3 tampak bahwa faktor penyebab kegagalan

kontraktor pada pelelangan proyek gedung paling banyak teridentifikasi dan paling bervariasi dibandingkan dua jenis proyek yang

lain. Sementara pada proyek bangunan air, faktor-faktornya paling sedikit jumlah maupun variasinya. Hasil ini dipengaruhi lebih banyaknya kontraktor peserta lelang pada proyek gedung dibandingkan dua jenis proyek yang lain, sehingga kemungkinan terjadinya kelalaian menjadi lebih tinggi dan pada

berbagai faktor yang berbeda. Sedangkan proyek bangunan air pada penelitian ini jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dua jenis proyek yang lain sehingga jumlah maupun variasi penyebab kegagalannya juga menjadi lebih terbatas.

Tabel 2. Penyebab kegagalan pada pelelangan proyek jalan dan jembatan

1. Faktor Kualifikasi
SBU asli tidak sesuai SBU pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)
2. Faktor Administrasi
a. Tidak hadir pada saat verifikasi.
b. Dokumen penawaran teknis
i. Surat Dukungan Material tidak disampaikan dan tidak sesuai dokumen penawaran
ii. Data persyaratan teknis tidak dapat diakses
c. ULP sudah mendapatkan 3 penawaran terbaik
3. Faktor Teknis
a. Metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dokumen penawaran, dan tidak melampirkan metode pelaksanaan
b. Peralatan tidak memenuhi kapasitas minimal persyaratan
c. Sertifikat kompetensi tidak dilampirkan dan tidak memenuhi syarat
4. Faktor Harga
Harga penawaran melebihi nilai total HPS dan nilai pagu

Tabel 3. Penyebab kegagalan pada pelelangan proyek bangunan air

1. Faktor Kualifikasi
Surat dukungan dari Bank tidak memenuhi ketentuan
2. Faktor Administrasi
a. ULP sudah mendapatkan 3 penawaran terbaik
b. Surat Dukungan Material tidak disampaikan dan tidak sesuai dokumen penawaran,
c. Surat Dukungan Alat tidak disampaikan dan tidak sesuai dokumen penawaran,
d. Data Persyaratan Teknis tidak sesuai ketentuan <i>E tendering</i>
3. Faktor Teknis
a. <i>Time schedule</i> tidak sesuai metode kerja dan tidak sesuai jadwal pelaksanaan yang ditawarkan
b. Perjanjian sewa alat tidak atas nama perusahaan pelamar dan tidak lengkap
c. Personil inti
i. Surat referensi pengalaman kerja personil inti tidak disampaikan,
ii. Jumlah minimal personil yang disampaikan kurang,
iii. Struktur organisasi tidak dilampirkan dan personil tidak sesuai

Tabel 1 sampai dengan Tabel 3 hanya menunjukkan faktor-faktor penyebab kegagalan saja, padahal penting pula untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan menjadi penyebab kegagalan kontraktor dalam mengikuti pelelangan. Dengan diketahuinya dominasi tiap faktor, kontraktor dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang dominan tersebut sebelum mengikuti pelelangan. Oleh karena itu analisis lanjutan untuk menampilkan diagram hirarki

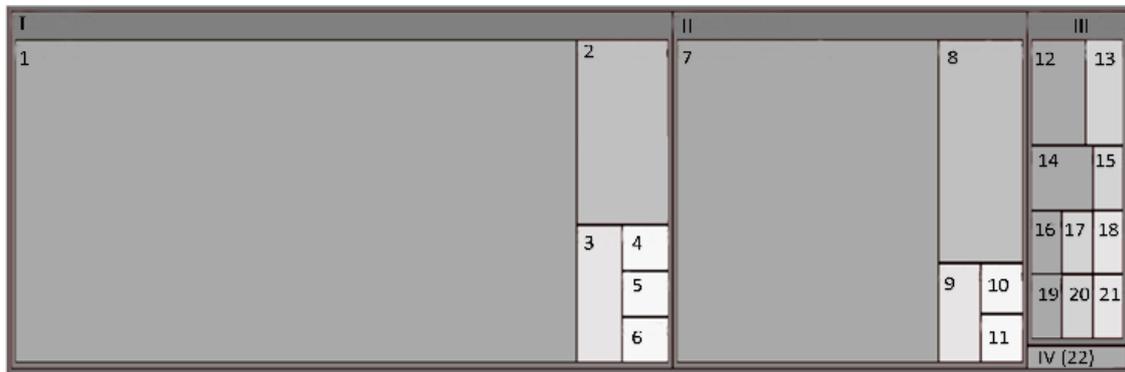
seperti telah dijelaskan sebelumnya perlu untuk dilakukan.

Analisis ini dilakukan dengan menampilkan diagram hirarki untuk ketiga jenis proyek. Ketiga diagram hirarki ini ditampilkan pada Gambar 2 untuk proyek gedung, Gambar 3 untuk proyek jalan dan jembatan serta Gambar 4 untuk proyek bangunan air. Diagram hirarki tidak menunjukkan frekuensi terjadinya tiap faktor penyebab kegagalan secara kuantitatif

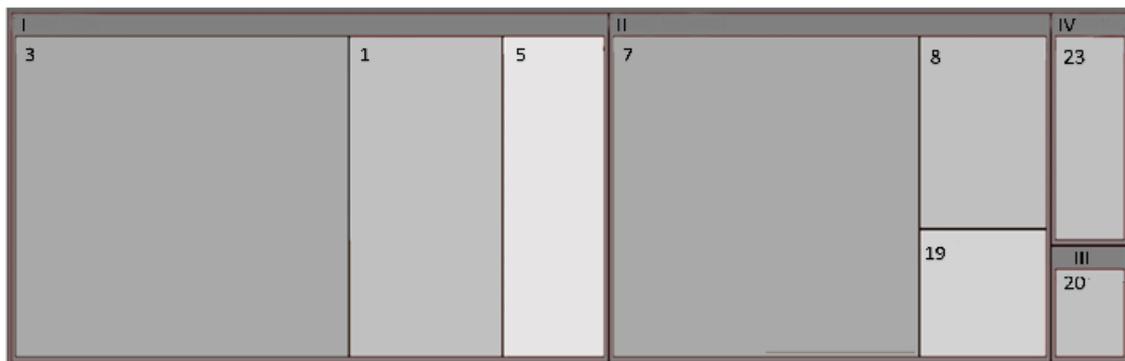
melainkan hanya membandingkan frekuensi terjadinya tiap faktor. Susunan empat persegi panjang dalam diagram hirarki ini diatur mulai dari wilayah terluas di bagian kiri atas dan selanjutnya mengarah ke kanan bawah untuk wilayah yang semakin kecil. Dengan kata lain, faktor yang paling sering terjadi terletak di bagian kiri atas, sementara faktor yang paling jarang terjadi diposisikan di ujung kanan bawah diagram.

metode pelaksanaan pada proyek jalan dan jembatan yang paling besar di antara area yang lain, hal ini menunjukkan bahwa pada penyebab kegagalan kontraktor paling banyak di koding pada faktor-faktor tersebut. Dengan kata lain faktor-faktor tersebut paling sering atau dominan menyebabkan kegagalan kontraktor dalam pevelangan. Baik personal inti maupun metode pelaksanaan merupakan bagian dari faktor teknis.

Pada gambar tampak luasan area untuk personal inti pada proyek gedung dan bangunan air, serta



Gambar 2. Komposisi penyebab kegagalan pada proyek gedung



Gambar 3. Komposisi penyebab kegagalan pada proyek jalan dan jembatan



Gambar 4. Komposisi penyebab kegagalan pada proyek bangunan air

Keterangan Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3 :

I Evaluasi Teknis

1 Personil inti

II Evaluasi Administrasi

7 Dokumen penawaran teknis

III Evaluasi Kualifikasi

18 Persyaratan klasifikasi

2 Penjadwalan proyek	8 Rincian harga penawaran	19 Formulir kemampuan dasar
3 Metode pelaksanaan	9 Verifikasi	20 Sertifikat Badan Usaha
4 Pekerjaan sub-kontraktor	10 Analisis teknis	21 Surat Ijin Usaha
5 Bukti kepemilikan alat	11 Surat perjanjian kerjasama	IV Evaluasi Harga
6 Spesifikasi teknis	12 Sertifikat ISO, OHSAS, SMK3	22 Analisis harga satuan pekerjaan
	13 NPWP asli	23 Harga penawaran
	14 Kesanggupan BPJS	
	15 SKP dan SKN	
	16 Akta pendirian perusahaan	
	17 Pengalaman sejenis	

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor teknis merupakan penyebab paling dominan yang mengakibatkan gagalnya kontraktor dalam pelelangan proyek pemerintah. Secara lebih spesifik, faktor teknis khususnya terkait personal inti pada proyek gedung dan proyek bangunan air, sementara pada proyek jalan dan jembatan, penyebab kegagalan didominasi faktor metode pelaksanaan.

Penelitian ini diharapkan akan menjadi wacana penelitian kualitatif khususnya di bidang manajemen konstruksi, yang selama ini masih jarang ditemui. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menggali alasan-alasan kontraktor tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang mengakibatkan kegagalan dalam pelelangan. Selain untuk penelitian lanjutan, diharapkan hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi para kontraktor untuk melakukan introspeksi diri dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi kegagalannya dalam pelelangan proyek-proyek pemerintah. Hasil penelitian ini didasarkan pada data pengadaan proyek-proyek pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun diharapkan akan dapat bermanfaat juga oleh para kontraktor lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA (DAN PENULISAN PUSTAKA)

G. M. Winch, *Managing Construction Projects: an Information Processing Approach*, Wiley-Blackwell, United Kingdom, 2010
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Syahrudin R. dan Rafie, "Proses Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan konstruksi Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur", *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil*, Universitas Tanjungpura. 2 (2), 2016

Z. Arifin dan D. Juwanti, "Studi Harga Penawaran Dan Faktor Penentu Pemenang Tender Proyek Konstruksi di DIY untuk Kualifikasi Non Kecil" *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil 7*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013

I.N.R. Karyasa, I.M.A.K. Salain dan M. Nadiasa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Badung". *Jurnal Spektran 2* (1): 19-27, 2014

G.N. Pio, I.N. Sutarja dan I.W. Yansen, "Analisis Faktor – Faktor Pemilihan Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Pada Proyek Pemerintah Di Kabupaten Sikka", *Jurnal Magister Teknik Sipil*, Universitas Udayana. 3 (2), 2015

L. Prihatini, A. Malik, dan R.T. Komara, "Evaluasi Kegagalan Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Dengan Sistem Elektronik (Studi Kasus: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan)", *JOM Fakultas Teknik Universitas Riau*. 4 (1), 2017

M. Saunders, P. Lewis dan A. Thornhill, *Research Methods for Business Students*, Pearson, 2012

Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*, Bandung Alfabeta.

Creswell, J. W. 2003. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, Sage.